



Jabatan Plt kok sampai Multiyears

Mundurinya Anton Dikhawatirkan Jadi Tren

JOGJA - Banyaknya jabatan yang lowong di lingkungan Pemprov DIJ mengundang keprihatinan Komisi A DPRD DIJ. Keprihatinan itu mengemuka karena beberapa jabatan tersebut dijalankan pelaksana tugas (Plt). Masa tugas Plt itu relatif berlangsung lama karena lebih dari setahun.

"Plt kok sampai *multiyears* melampaui satu

tahun anggaran," sindir Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Sukarman di gedung dewan provinsi kemarin (3/1).

Kondisi itu di mata Sukarman menjadi preseden buruk. Membiarkan sebuah lembaga dijalankan Plt, menurut Sukarman, membuat roda organisasi itu tidak berjalan optimal. Pejabat yang ditunjuk menjadi Plt cenderung tidak fokus dengan tugas pokok dan fungsinya. Gara-garanya pejabat tersebut harus rangkap jabatan. "Konsentrasinya terbagi," ucapnya.

► Baca *Jabatan...* Hal 7

■ JABATAN...

Sambungan dari hal 1

Kosongnya jabatan kepala instansi yang jumlahnya mencapai setengah lusin menjadi kado kurang mengenakan di awal tahun. Karena itu, Sukarman mendesak enam jabatan yang lowong itu secepatnya diisi. Tidak ada jalan lain kecuali secepatnya melantik pejabat yang lolos lelang terbuka untuk menempati sejumlah posisi yang kosong.

Komisi A berencana membahas persoalan itu dengan mengundang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto. Ketua Baperjakat *ex-offio* atau secara otomatis dijabat Sekprov



KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA
Sukarman

DIJ Gatot Saptadi. "Kami undang dalam rapat kerja pada Senin (8/1) mendatang," katanya.

Adapun enam jabatan yang diisi Plt itu meliputi sekretaris DPRD DIJ, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala dinas ke-

lautan dan perikanan, Assekprov Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala dinas PUP dan ESDM.

Satu lagi adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Jabatan kepala instansi itu lowong sejak 2 Januari 2018 setelah pejabatnya Budi Antono secara mengejutkan mengundurkan diri.

Mundurinya Anton, sapaan akrab Budi Antono sampai sekarang tidak diketahui parlemen. Bahkan pimpinan dan anggota Komisi B yang menjadi mitra kerjanya pun tidak tahu.

Ketua Komisi B Janu Ismadi mengaku kaget dengan mundurnya Anton tersebut. Janu mencurigai ada sesuatu yang menjadi pendorong mantan penjabat bupati Gunungkidul dan Kulon-

progo itu memutuskan mengambil langkah drastis. "Ini tidak lazim dilakukan pejabat eselon II a," ungkapnya.

Sebagai mitra kerja, Janu tertarik menelusuri lebih jauh latar belakang pemicu mundurnya Anton tersebut. Dia berencana mencari tahu. Komisi B secara khusus akan meminta keterangan Sekprov guna menjelaskan permasalahan itu. "Secara informal dan formal akan kami tanyakan," ujar kader Partai Golkar ini.

Janu khawatir jika tak disikapi dengan bijak, pengunduran diri pejabat seperti dilakukan Anton bisa menjadi tren. Mereka yang merasa kecewa bisa saja mengikuti jejak Anton tersebut. "Kalau yang mundur sampai massal bisa mengundang masalah," ingatnya.

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Sekretaris Komisi B Suparja juga menyampaikan hal senada. Dia mengatakan tak ada informasi secul pun mengabarkan Anton bakal pensiun dini. Selama ini seakan-akan berjalan biasa dan baik-baik saja.

Karena itu, ketua DPD Partai Nasdem Gunungkidul itu mengaku terkejut begitu mendengar informasi salah satu mitra kerja Komisi B itu telah lengser dari jabatannya sejak 2 Januari 2018.

Suparja ingin kekosongan posisi kepala dinas perindustrian dan perdagangan tidak berlangsung lama sebagaimana lima posisi lainnya. Dia ingin jabatan itu segera diisi dan tidak dijalankan Plt.

"Apakah mau dengan cara pergeseran atau lewat lelang, silakan saja. Jangan lama-lama," desaknya.

Persoalan hampir serupa terjadi di Pemkot Jogja. Saat ini tercatat ada 11 kursi jabatan eselon II yang lowong dan harus dijalankan oleh Plt. Antara lain, dinas pariwisata, dinas komunikasi informatika dan persandian, dinas kebakaran, dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas pemuda dan olahraga, dinas per-

anian dan pangan, badan penanggulangan bencana daerah, sekretaris DPRD, seta Assekda Pemerintahan dan Kesra. Selain itu masih ada 71 lowongan kosong untuk jabatan eselon III dan IV.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Agus Nur meminta pemkot segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi posisi jabatan eselon II yang lowong. Lebih dari itu, Agus juga mendesak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja mengulang proses uji kompetensi bagi seluruh pejabat eselon II yang ada saat ini.

Hal itu guna menentukan posisi yang tepat untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Disesuaikan latar belakang pendidikan dan kemampuan masing-masing. Atau istilahnya *the right man on the right place*. Agus Nur mengakui, hal itu bukan perkara mudah. Apalagi untuk menyesuaikan seseorang berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya. Hanya, hal itu bukan alasan untuk tidak dilaksanakan. Setidaknya penilaian pejabat bisa diukur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mereka selama ini berdasarkan analisis jabatan. "Dasarnya harus kualitas, bukan

subjektivitas. Basisnya kinerja, bukan *like and dislike*," sindir politikus Partai Golkar itu.

Kepala BKPP Kota Jogja Maryoto mengatakan, jabatan kosong untuk sementara akan diisi dengan mekanisme pergeseran atau mutasi. Sambil menunggu proses lelang jabatan. Kendati hanya menempuh mekanisme mutasi, setiap pejabat terkait pun tetap harus menjalani uji kompetensi layaknya lelang jabatan. Pesertanya adalah pejabat eselon III dan IV yang mendapat rekomendasi dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat).

"Ada ujian tertulis hingga wawancara oleh panitia seleksi," katanya. Sementara lelang jabatan dibuka untuk pejabat eselon III yang ingin promosi ke eselon II.

Soal pelaksanaan mutasi, Maryoto enggan membeberkannya. "Nunggu Pak Wali," elaknya.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti hanya meminta para aparatur sipil negara di lingkungan pemkot tetap menunjukkan kinerja secara optimal dan tidak perlu resah akan proses mutasi. Alasannya, itu adalah hal lumrah dalam sebuah birokrasi pemerintahan. (kus/pru/yog/rg)

Dinakhodai Plt

<p>6 Jabatan Eselon II a Lowong Pemprov DIJ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris DPRD DUJ 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Assekprov Perekonomian dan Pembangunan 5. Kepala Dinas PUP dan ESDM 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 	<p>11 Jabatan Eselon II b Lowong Pemkot Jogja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pariwisata 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 3. Kepala Dinas Kebakaran 4. Dinas Sosial 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Sekretaris DPRD 11. Assekda Pemerintahan dan Kesra
--	---	---

ERWAN TRIHASTONO/BADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005